

## **Keterlibatan Stakeholder dalam Penanganan Stunting di Gampong Lam Ujong Aceh Besar**

**Rozatul Jannah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
e-mail: 220802020@student.ar-raniry.ac.id

**Muhammad Rizqil Asqal**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
e-mail: 230802004@student.ar-raniry.ac.id

**Hanunawati**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
e-mail: 220802003@student.ar-raniry.ac.id

**Khairudiza**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
e-mail: 220802120@student.ar-raniry.ac.id

**Khablil Warid**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
e-mail: 210802105@student.ar-raniry.ac.id

**Muhammad Khairul Ajyal**

National Forensic Sciences University, Gujarat  
e-mail: khairulajyal@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to explore the involvement of stakeholders in handling stunting in Gampong Lam Ujong, Aceh Besar. Stunting is a chronic health problem that affects children's growth due to long-term malnutrition. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The focus of the research is the role of stakeholders, such as keuchik, posyandu cadres, village midwives, and the community in the implementation of the stunting handling program. The results showed that collaboration between various stakeholders has contributed significantly to reducing stunting rates in Gampong Lam Ujong. The Supplementary Feeding Program (PMT), supporting facilities, and active involvement of posyandu and the community are key success factors. Strong leadership, clear procedural mechanisms, and well-allocated resources also support the effectiveness of the program. However, this study also found several challenges, such as budget constraints, low parental participation in supporting children's nutritional intake, and the need for improved program monitoring. This study recommends strengthening the capacity of health cadres, improving nutrition education, and more intensive collaboration with related parties to ensure program sustainability.*

**Keywords:** Stakeholder Engagement, Collaborative Governance, Stunting

## **A. Pendahuluan**

Stunting merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan fisik anak yang terhambat, sehingga tinggi badannya lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini merupakan manifestasi dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, dimulai sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Faktor stunting melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor-faktor yang kerap terjadi terhadap stunting antara lain, faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung sendiri melibatkan kurangnya asupan energi, protein, mikronutrien (seperti zat besi, yodium, dan vitamin A) dalam jumlah dan kualitas yang sedikit, sedangkan faktor tidak langsung melibatkan lingkungan dan juga ekonomi.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa prevalensi balita mengalami stunting di Indonesia di tahun 2019 sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2018, yaitu dari 30,8% menjadi 27,7% namun angka ini tetap termasuk tinggi. Pada tahun 2007, angka stunting di Indonesia mencapai 36,8%, pada 2010 mencapai 34,6%, 2013 mencapai 37,2% dan pada tahun 2018 berjumlah 30,8%. Angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia. Diketahui, saat ini alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 132,2 Triliun, naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 123,1 Triliun (Jurnal Ilmiah, 2022).

Berdasarkan kondisi Stunting dari data Provinsi Aceh umumnya pada tiga tahun terakhir dari tahun 2021-2023 menunjukkan trend yang positif. Prevalensi stunting di tahun 2021-2023 berturut-turut 33,2; 31,2 dan 29,4%, artinya dari tahun 2021-2023 telah terjadi penurunan sebesar 3,8%. Penurunan angka Stunting tidak diikuti oleh kejadian wasting, dimana angka wasting mengalami kenaikan sejak beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2023 angka wasting naik menjadi 13,6%. Sedangkan pada tahun 2022 angka wasting berada di angka 11,3%, artinya terjadi kenaikan sebesar 2,3%. Masalah gizi lainnya yang mengalami kenaikan adalah overweight. Pada Tahun 2023 angka overweight berada di angka 3,5%, mengalami kenaikan sebesar 1,6% dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 1,9%. Idealnya, penurunan angka stunting juga diikuti oleh penurunan angka masalah gizi lainnya.

Data ini menunjukkan kemungkinan belum idealnya intervensi PMT di kelompok umur balita. Anak yang mengalami wasting diduga tidak mendapat asupan gizi yang adekuat, sedangkan pada kelompok overweight diduga terjadi kelebihan asupan zat gizi terutama pada kelompok karbohidratnya.

Berdasarkan hasil Intervensi Serentak Pencegahan Stunting terdapat sebanyak 168.729 (42,52%) balita mengalami masalah gizi dari 398.467 balita yang diukur di posyandu, dan baru 14.164 (8,39%) yang sudah mendapat intervensi PMT pemulihan. Seharusnya semua balita yang mengalami masalah gizi harus segera mendapat intervensi PMT. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat 115.556 balita yang tidak naik berat badan, 9.314 balita berat badan kurang, 14.641 balita gizi kurang, dan 1.211 gizi buruk. Semua balita yang mengalami masalah gizi tersebut berpotensi menjadi Stunting (Laporan TPPS Aceh, 2024)

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan instansi lain yang berkaitan, berhasil mencapai angka 100% dalam penimbangan dan pengukuran balita di wilayah Aceh Besar. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama antara Dinas Kesehatan, dan lintas terkait, terutama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB PP dan PA) Aceh Besar, Puskesmas, jajaran Forkopimcam, TP PKK Kecamatan, hingga Keuchik serta TP PKK gampong se-Aceh Besar, dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurut data terbaru, jumlah balita stunting di Aceh Besar adalah 5.025 anak, dengan prevalensi sebesar 16,2%. Data menunjukkan terjadinya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana angka stunting mencapai 30,1%. Selain itu, terdapat 3.745 balita yang berisiko mengalami wasting, dengan prevalensi 12% (Dinas Pengendalian Penduduk Aceh Besar, 2024).

Keterlibatan Pemerintah Aceh dan Aceh Besar dalam Penanganan Stunting telah menunjukkan komitmen yang kuat dan telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam upaya penurunan angka Stunting. Beberapa langkah yang telah dilakukan diantaranya: Pertama, Penetapan Kebijakan dan Regulasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kedua,

intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Pelaksanaan program imunisasi rutin untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil guna mencegah anemia (Dinas Kesehatan Aceh, 2024).

Ketiga, Intervensi sensitif meliputi peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Penyuluhan gizi masyarakat terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui. Peningkatan kualitas pendidikan tentang gizi dan kesehatan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah (Indrawati, 2024). Keempat Pelaksanaan Program Unggulan yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), program ini menjadi fokus utama dalam upaya penurunan stunting, dengan memberikan perhatian khusus pada gizi ibu hamil, menyusui, dan anak usia dibawah 2 tahun.

Kegiatan Posyandu dijadikan sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan Rumoh Gizi Gampong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak Stunting. Melakukan Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan efektivitas program penurunan Stunting (Yurenda & Aurelia, 2024).

Gampong Lam Ujong merupakan salah satu gampong yang berada di Pemukiman Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan luas wilayah keseluruhan dari data SIGAP yaitu 1.234 km<sup>2</sup>. Saat ini Gampong Lam Ujong sedang menjalankan program pencegahan stunting untuk anak-anak dan balita dimana program tersebut di atas tanggung jawab puskesmas setempat yakni Puskesmas Lambaro Angan.

Dalam hal pelaksanaan, pihak desa yang berwenang melakukan banyak kegiatan, seperti memasak langsung makanan yang menyehatkan oleh ibu-ibu posyandu, melakukan timbangan dan pengecekan kesehatan pada setiap anak, memberikan akses untuk mereka bermain dan lain sebagainya. Di Gampong Lam Ujong dalam proses pelaksanaan program stunting sudah tersedia pembangunan dengan sarana dan prasarana yang lengkap, yaitu adanya gedung serbaguna dengan halaman depan disugahi permainan anak-anak, adanya rumah kontrak yang dijadikan sebagai tempat memasak bagi ibu-ibu untuk dibagikan kepada setiap

anak-anak dan balita yang terdapat di gampong ini. Berikut data Stunting di Gampong Lam Ujong yang diperoleh pada tahun 2024.

Nama	Tanggal Lahir	Nama Orang Tua
Azam	23-10-2020	Fahmi Agustin
Azim	23-10-2020	Fahmi Agustin
Lisa Sidqia Alia	02-02-2021	Muslim
Atiya Balqia	29-09-2021	Samsul Kamal
Abiyan atharfajri	23-01-2023	Maimun
M.Raihan	14-09-2020	Mahfuddin
Rafa almalik	12-08-2021	Iskandar
Zahra Syauqia	30-04-2020	Azhari
Aulia Al-Aziz	07-01-2023	Wahyudi

**Tabel 1.1 Data anak Stunting Gampong Lam Ujong**  
 Sumber: Laporan Posyandu Lam Ujong, 2024

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Stunting di Gampong Lam Ujong sangat banyak diantaranya yaitu pemberian ASI eksklusif kurang dari enam bulan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Bagi balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama biasanya lebih rentan terkena Stunting. Stunting memiliki beberapa dampak, yaitu pada jangka pendek dan jangka panjang. dampak jangka pendek dari Stunting dapat dilihat dari Pertumbuhan fisik seseorang terhambat dimana tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badannya rendah, ketika pertumbuhan otak sedang berkembang menjadi terganggu, menghambat kemampuan kognitif, belajar, dan konsentrasi (Komalasari, 2020).

Keberhasilan dalam penanganan Stunting di Gampong Lam Ujong adalah dengan adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antara semua stakeholder. Dimana Stakeholder merupakan pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan, yaitu semua anggota atau pihak baik dari individu, kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan, keterkaitan, atau kepentingan dengan organisasi, perusahaan, lembaga dan lainnya yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (*positive-negative*) cara kerja menjalankan organisasi. Masing-masing

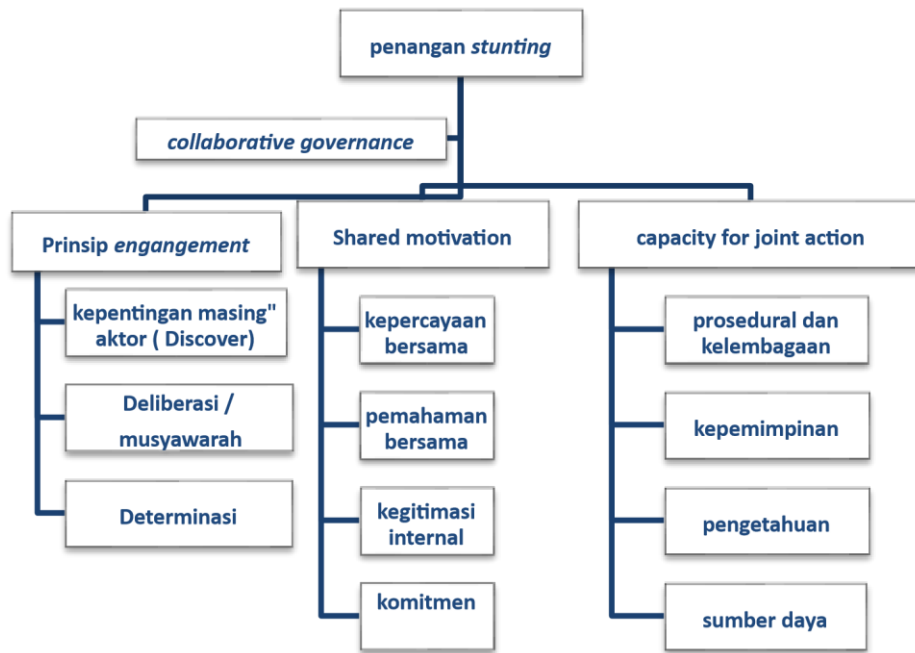
pihak memiliki peran yang berbeda namun harus saling mendukung, melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting di Gampong Lam Ujong yaitu diantaranya Keuchik sebagai kepala desa, kader posyandu dan bidan gampong berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat gampong dengan layanan kesehatan serta masyarakat yang ikut berpartisipasi (Hidayah, 2019).

Berdasarkan peneliti ini bertujuan untuk meninjau Keterlibatan Stakeholder Dalam Penanganan Stunting di Gampong Lam Ujong, Aceh Besar. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan stunting di Aceh Besar menjadi isu penting, mengingat meningkatnya prevalensi Stunting di wilayah tersebut. Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi partisipasi stakeholder dalam upaya penanggulangan Stunting, serta dampaknya terhadap kebijakan dan program yang ada. Stakeholder ini meliputi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat, dan sektor swasta. Setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengatasi masalah Stunting, namun sering kali terdapat ketidakseimbangan dalam pengaruh dan keterlibatan mereka.

Dalam penanganan Stunting, peneliti menerapkan konsep Collaborative governance dengan melihat keterlibatan Stakeholder yang terkait. Hal ini penting karena penanganan stunting memerlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah. “*Collaborative Governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat berbagai pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Collaborative governance juga berperan sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik (Ansell and Gash, 2007:543)”.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu konsep *Collaborative Governance* dapat mengoptimalkan kinerja para Stakeholder dan memberikan dampak kepada masyarakat menjadi lebih tereduksi dan terarah pada saat mengatasi masalah.

Dengan menggunakan konsep kolaborasi menjadikan upaya pengumpulan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak (Simatupang dan Sridharan, 2008). Maka dengan ini peneliti meyakini bahwa konsep *Collaborative Governance* dengan melihat sisi Stakeholder pada stunting di Gampong Lam Ujong, Aceh Besar dapat menangani Stunting.



**Gambar. 1.1 Framework Collaborative Governance**

Sumber: Olahan Penulis

Dinamika proses kolaborasi oleh Emerson (2013) dipandang sebagai siklus interaksi yang oriteratif dalam konsep *Collaborative Governance* yang terbagi menjadi 3 komponen, yaitu :

Prinsip *engagement* merupakan sebuah jembatan lintas organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan agenda pertemuan, baik dalam musyawarah pribadi, musyawarah publik, maupun musyawarah khusus lainnya. Dalam tahapan proses ini, terdapat beberapa elemen penting, yaitu mengungkapkan kepentingan masing masing aktor, deliberasi/ musyawarah, dan determinasi. Dalam kolaborasi ini terdapat keterlibatan aktor

Gampong Lam Ujong yang terdiri dari berbagai pihak, seperti Stakeholder yang meliputi Keuchik, kader posyandu, bidan desa dan masyarakat.

Dalam konteks penanganan Stunting, kolaborasi ini melibatkan prinsip-prinsip keterlibatan yang mencakup saling kepercayaan, pemahaman, legitimasi internal, komitmen, kepemimpinan, serta pengaturan prosedural dan kelembagaan. Selain itu, pengetahuan dan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas untuk aksi bersama. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menciptakan keterlibatan yang efektif di antara para aktor yang terlibat.

*Shared motivation*, didefinisikan sebagai siklus dalam upaya mempertahankan diri, yang di dalamnya melibatkan saling percaya, pemahaman terhadap komitmen, dan legitimasi internal sebagai elemen-elemen kunci (Emerson, 2011). Motivasi bersama seringkali disebut sebagai modal sosial karena mencakup aspek interpersonal dan rasional dalam dinamika kolaboratif. Proses keterlibatan adalah langkah untuk membangun kepercayaan, namun untuk memperluas transmisi kepercayaan tersebut, diperlukan upaya maksimal untuk menjangkau semua pihak yang terlibat. Rasa saling percaya ini dapat terjalin antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan NGO, serta LSM.

Oleh karena itu, inisiatif untuk membangun kepercayaan tidak hanya harus datang dari pemerintah, tetapi juga dari pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berupaya membangun kepercayaan melalui pertemuan monitoring di tingkat OPD dan kabupaten, pelatihan untuk masyarakat, serta sosialisasi program stunting melalui media elektronik.

*Capacity for joint action*, Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang dilakukan secara kolektif (Himmelman, 1994 dalam Emerson 2011). Kerjasama ini dilaksanakan untuk meraih tujuan bersama dengan meningkatkan kapasitas, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kerangka kerja Emerson, kapasitas untuk melakukan aksi bersama dipahami sebagai kombinasi dari kepemimpinan, pengetahuan, prosedur, serta pengaturan kelembagaan. Elemen-elemen ini dikembangkan melalui proses interaksi yang berlandaskan prinsip dan motivasi bersama seiring berjalannya waktu.



## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif eksploratif melalui teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber penelitian ini merupakan data primer hasil dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dari Gampong Lam Ujong dan data sekundernya diperoleh dari dokumen pada pelaksanaan di lapangan. Kemudian Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yakni tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta penyimpulan atau verifikasi ulang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi pengalaman, pengetahuan, peranan, juga partisipasinya sesuai dengan topik penelitian. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dan fokus informan dalam penanganan Stunting di Gampong Lam Ujong yaitu diantaranya Keuchik Gampong Lam Ujong, dan masyarakat yang ikut serta dalam program Stunting. Posyandu sebagai wadah tempat berlangsungnya proses program Stunting yang didalamnya ditanggung jawabkan oleh kader posyandu dan bidan gampong berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat gampong dengan layanan kesehatan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 tahapan dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini membahas program stunting yang dilaksanakan di Gampong Lam Ujong yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Program *Stunting* dilaksanakan karena banyak anak desa yang mengalami hambatan pada masa pertumbuhan, sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan program yang dinamai program *Stunting*.

Stanford Research Institute memperkenalkan teori Stakeholder pertama kali pada tahun 1963 yang mendeskripsikan Stakeholder sebagai sekelompok orang

yang tidak akan dibentuk tanpa adanya dukungan atau kesepakatan dari organisasi. Teori ini muncul dengan latar belakang masalahnya yaitu sebagai bentuk klarifikasi dan evaluasi konsep cara kinerja perusahaan. Lalu Freeman menyatakan sarana analisis yang paling efektif bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan adalah pemahaman interaksi antara kelompok dan individu yang saling mempengaruhi juga berpengaruh.

Teori Stakeholder mendefinisikan Stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori Stakeholder adalah kerangka kerja yang sangat penting dalam manajemen karena dapat mendorong organisasi untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Stakeholder terkenal melalui buku R. Edward Freeman pada tahun 1984 yang berjudul "Strategic Management: A Stakeholder Approach". Freeman telah membuat karya yang sangat penting dalam mengalihkan fokus dari pandangan yang berpusat pada pemegang saham menjadi pandangan yang mempertimbangkan kepentingan semua Stakeholder. Dia berpendapat bahwa organisasi itu harus mengelola hubungan Stakeholder untuk memastikan kesuksesan dan juga keberlanjutan proses jangka panjang (Samatha, 2011).

### **1. Prosedural dan kelembagaan**

Prosedural/kelembagaan yang menjadi aspeknya adalah *Stakeholder* memberikan arahan dasar terkait serangkaian langkah yang terorganisir dan terukur mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak program, meliputi analisis situasi yang dilakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi kelompok berisiko dan mengumpulkan data secara komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab stunting. Tujuannya yaitu untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang ditujukan guna mengurangi angka stunting di Gampong Lam Ujong.

Prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan, termasuk mekanisme koordinasi antar *Stakeholder*, harus diatur untuk memastikan bahwa semua *Stakeholder* dapat berkontribusi secara optimal. Selain itu, kelembagaan yang kuat

dan terintegrasi, seperti pembentukan tim atau gugus tugas khusus yang fokus pada penanganan stunting, dapat memperkuat kolaborasi antar sektor.

## 2. **Kepemimpinan**

Indikator kepemimpinan dilihat dari aspek penurunan stunting memerlukan kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan sistemik kepemimpinan, dalam konteks ini berarti tidak hanya mengelola program, namun juga mengembangkan dan menerapkan strategi komprehensif untuk mengatasi masalah *stunting*. Seperti visi yang jelas dan komprehensif yang mampu mengartikulasikan visi jangka panjang yang mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner di tingkat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan alokasi sumber daya yang memadai untuk program-program penanganan stunting. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu stunting akan mampu menggerakkan berbagai pihak khususnya pada tingkat desa termasuk sektor kesehatan, sosial dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama.

Selain itu, kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan *Stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan lokal akan menciptakan rasa memiliki dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Hal ini sudah dicapai dalam program *Stunting* di Gampong Lam Ujong, dimana *Stakeholder* yang terlibat saling berpartisipasi satu dengan lainnya untuk mewujudkan penurunan angka *Stunting*.

Geuchik Gampong Lam Ujong telah mewujudkan kepemimpinan yang efektif dengan selalu memantau dan mengevaluasi program secara berkala, serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil setiap evaluasi. Nurmala sebagai ketua posyandu juga telah mampu bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya dengan mendisiplinkan anggotanya secara baik dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian,

adanya kepemimpinan yang kuat, terarah, dan responsif, diharapkan Gampong Lam Ujong dapat mewujudkan penurunan angka *Stunting* di setiap tahunnya.

### 3. Sumber Daya

Terakhir, indikator sumber daya dilihat dari aspek sumber daya manusia yaitu, tenaga kesehatan, pelaksana kesehatan, pengelola posyandu beserta anggotanya yang juga berperan dalam mendukung pelaksanaan program. Sumber keuangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah merupakan sumber utama pendanaan program.

Anggaran PMT *Stunting* yang disalurkan kepada Gampong Lam Ujong pada tahun lalu sebanyak Rp. 2.400.000 selama 12 bulan, per-bulan nya sekitar Rp.200.000. Kemudian, dana PMT *Stunting* pada tahun ini sebanyak Rp.3.2000.000 selama 12 bulan, per-bulannya yaitu Rp.266.000. Sumber pangan: nutrisi pendamping berisi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tertentu dan suplemen asi kaya nutrisi atau Makanan Pendamping Asi (MPASI) sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

Makanan yang diberikan pada program *Stunting* di Gampong Lam Ujong berupa telur, kacang hijau, gula, susu UHT, regal dan buah. Dilengkapi juga dengan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati infeksi yang sering dikaitkan dengan keterbelakangan pertumbuhan serta alat kesehatan untuk memantau tumbuh kembang anak, seperti timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, dan alat laboratorium.

Penulis menyatakan tentang kondisi lapangan yaitu Gampong Lam Ujong, Aceh Besar. Terkait informan, peneliti kesulitan dalam menemui aktor yang terlibat dalam penanganan *Stunting*. Terdapat beberapa permasalahan seperti kesulitan waktu, sebab hampir seluruh *Stakeholder* jam penemuannya berbeda-beda karena pekerjaan masing-masing. Kemudian, beberapa informan memiliki kesulitan menyampaikan informasi jika dilihat dari latar belakang pendidikan. Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan informasi dan keterbatasan data yang diperoleh. Terlepas dari itu, proses turun lapangan tetap berjalan lancar sesuai dengan harapan.

Meskipun program telah berjalan dengan baik, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keberlanjutan program setelah periode tertentu dan

potensi perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah, seperti temuan dari wawancara dengan ibu Nurmalia, kader posyandu, serta data yang telah dihimpun, dapat disimpulkan bahwa program penanganan *Stunting* di Gampong Lam Ujong telah menunjukkan inisiatif yang baik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Hasil analisis data wawancara ini menunjukkan bahwa program *Stunting* di Aceh memiliki potensi yang besar untuk berhasil. Namun, keberhasilan program ini perlu terus dipantau dan ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan program yang berkelanjutan.

Dilihat dari hasil penelitian tentang keterlibatan Stakeholder dalam penanganan *Stunting* di Gampong Lam Ujong, Aceh Besar, menunjukkan bahwa *Stunting* adalah masalah kesehatan kronis yang membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Penulis menekankan pentingnya peran keuchik, kader posyandu, dan bidan desa sebagai jembatan penghubung antara layanan kesehatan dan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua pemangku kepentingan ikut terlibat di dalam setiap program selama proses berlangsung. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang efektif antara Stakeholder telah berkontribusi nyata dalam menurunkan angka *Stunting*. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penyuluhan gizi yang dilakukan secara teratur menjadi faktor kunci keberhasilan. Namun, penulis juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi orang tua, dan perlunya peningkatan monitoring program.

Penulis merekomendasikan penguatan kapasitas kader kesehatan serta peningkatan edukasi gizi kepada masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih intensif antara pihak-pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan program penanganan *Stunting*. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa keberhasilan dalam menangani *Stunting* tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka stunting di Gampong Lam Ujong Aceh Besar merupakan hasil dari upaya kolaboratif berbagai Stakeholder. Peran aktif dari kader kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak. Selain itu, ketersediaan makanan bergizi dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi faktor kunci. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti mempertahankan keberlanjutan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih merata.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Stunting di Gampong Lam Ujong telah mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat, keuchik, dan Stakeholder terkait. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam program ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan Stunting. Karena adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menunjukkan keberhasilan upaya sosialisasi dan mobilisasi masyarakat.

Hal ini didukung oleh kepemimpinan yang kuat dari keuchik dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Serta program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah berjalan dengan baik, ditandai dengan ketersediaan PMT dan distribusi yang teratur. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah penerima PMT untuk memastikan semua anak yang berhak mendapatkannya telah tercakup.

#### **Daftar Pustaka**

- Jurnal Ilmiah et al., “Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara” 1, no. 2 (2022): 91–99.
- T I M Percepatan, Penurunan Stunting, and Pemerintah Aceh, “Laporan TPPS Aceh,” no. 0651 (2024)
- Dinas Pengendalian Penduduk, “Aceh Besar Raih Capaian 100 Persen Dalam Penimbangan Dan Pengukuran Balita” (2024): 2–4.
- “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting-Gubernur Aceh,” n.d.

Lakukan Minimal, “Tingkatkan Capaian Imunisasi Rutin Di Aceh , Meuseuraya Inisiatif Gandeng Bidan Desa” (2024).

Indrawati Aris Tyarini, “Peningkatan Kesadaran Gizi Masyarakat Melalui Program Edukasi Nutrisi Seimbang” (2024): 33–39.

Ditulis Oleh, Bdn Yurenda, and Aurelia S Tr, “Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dan Anak Balita Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi” (2024).

“Laporan Gampong Lam Ujong Aceh Besar-Anwar Ishak” (n.d.).

Faktor-faktor Penyebab, “Majalah Kesehatan Indonesia Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Balita” 1, no. 2 (2020): 51–56.

Ni A Hidayah et al., “Jurnal Pengembangan Stakeholder Program Pencegahan Stunting” 7 (2019): 55–71.

Samantha Miles , Andrew L. Friedman, Stakeholders Theory and Practice, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, vol. 44, 2011.

Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, “Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo),” Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 (2016): 1–13.

Perpres, “Peraturan Presiden No. 28,” no. 1 (2020).

Windy Pratama, “Dengan RAN PASTI, Pasti Turunkan Stunting Jadi 14 % Pada Tahun 2024,” 2022.

Arrozaaq, “Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo).”

Intje Picauly et al., “Pendampingan 25 Indikator Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering 3, no. 1 (2022): 32–43, <https://doi.org/10.51556/jpkmkelaker.v3i1.178>.

Agranoff, Robert. 2003. Collaborative Public Management. Washinton, DC: Georgetown University.

Ansel, Chris., and Alison Gash. 2008. Collaborative Governance in theory and Practice. Journal of Public Administration Reasearch and Theory 18 (4) 543-571.

Emerson, K., & Nabatchi, T. 2015. Collaborative Governance Regimes. Washington DC: Georgetown University Press.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, (June 2009), 1–29. *Jurnal of Public Administration Research and Theory*.

Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. 2012. Intergratif Fremwork for Collaborative Governance. *Journal of Administration Reasearch and Theory*, Vol. 22. 1, hal. 1-29.

Ipan, I., Purnamasari, H., dan Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *KINERJA*, 18(3), 383-391.